

Alasan Turki Menolak Swedia Bergabung dengan NATO Tahun 2023

Pratus Ezra Mariana S. Ruku ¹⁾, I Made Anom Wiranata ²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha ³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis alasan di balik penolakan Turki terhadap upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO pada tahun 2023, sebuah isu yang menjadi penting dalam konteks meningkatnya ketegangan geopolitik di Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Turki menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan menekankan peran identitas nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara mendalam untuk menggali persepsi dan motivasi Turki dalam menolak akses Swedia ke NATO. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penolakan Turki didorong oleh kekhawatiran terkait identitas nasional dan keamanan domestik, khususnya dalam konteks konflik dengan kelompok Kurdi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa identitas nasional dan persepsi ancaman memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik Turki, yang berimplikasi pada dinamika keamanan di Kawasan.

Kata-kunci : Turki, NATO, Konstruktivisme, Identitas, Swedia

Abstract

This study focuses on analyzing the reasons behind Turkey's rejection of Sweden's bid to join NATO in 2023, an issue that has become crucial in the context of rising geopolitical tensions in Europe. This study aims to identify the factors influencing Turkey's decision using a constructivist approach, emphasizing the role of national identity. This study employed qualitative methods with document analysis and in-depth interviews to explore Turkey's perceptions and motivations for rejecting Sweden's NATO accession. The research findings indicate that Turkey's rejection is driven by concerns related to national identity and domestic security, particularly in the context of the conflict with the Kurds. This study concludes that national identity and threat perceptions play a significant role in Turkey's political decision-making, which has implications for security dynamics in the region.

Keywords : Turkey, NATO, Constructivism, Identity, Sweden

Kontak Penulis

Pratus Ezra Mariana S. Ruku

Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Bali, Indonesia
Telp: +6289643866987
E-mail : rukuezra2@gmail.com

PENDAHULUAN

North Atlantic Treaty Organization (NATO) merupakan aliansi pertahanan kolektif yang dibentuk pada 4 April 1949 oleh negara-negara di Amerika Utara dan Eropa. Tujuan utama NATO adalah menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Atlantik Utara serta memperkuat kerja sama militer antar anggotanya. Sejak berdirinya dengan 12 negara anggota awal, NATO telah berkembang menjadi 30 anggota dengan peran strategis yang signifikan di kancah politik dan keamanan internasional.

Perkembangan geopolitik, khususnya pasca-Perang Dingin, memicu gelombang ekspansi NATO ke Eropa Timur. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran Rusia, yang memandangnya sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Ketegangan ini semakin meningkat setelah aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014 dan invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Situasi tersebut mendorong negara-negara dekat Rusia, termasuk Swedia dan Finlandia, untuk mempertimbangkan keanggotaan NATO sebagai langkah penguatan keamanan nasional.

Pada Mei 2022, Swedia dan Finlandia secara resmi mengajukan diri untuk bergabung dengan NATO. Namun, Turki sebagai salah satu anggota NATO menolak keanggotaan Swedia dengan menggunakan hak vetonya. Penolakan ini menjadi sorotan internasional karena dinilai bertolak belakang dengan prinsip keamanan kolektif NATO.

Bagi Turki, penolakan tersebut tidak hanya terkait faktor strategis, tetapi juga mencerminkan kepentingan domestik, khususnya isu keamanan internal yang berkaitan dengan kelompok separatis Kurdi. Swedia dinilai memiliki sikap permisif terhadap kelompok Kurdi, termasuk memberikan perlindungan kepada individu yang dianggap oleh Ankara sebagai teroris. Hal ini memicu

ketegangan hubungan bilateral yang sudah sensitif sebelumnya.

Dari perspektif hubungan internasional, fenomena ini menarik untuk dianalisis karena melibatkan interaksi antara kepentingan nasional, identitas, dan dinamika politik keamanan kolektif. Teori konstruktivisme yang menitikberatkan pada peran identitas dan persepsi ancaman menjadi kerangka analisis yang tepat untuk memahami keputusan Turki tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Mengapa Turki menolak keanggotaan Swedia dalam NATO pada tahun 2023?

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Turki menolak Swedia bergabung dengan NATO.
2. Menganalisis penolakan tersebut melalui perspektif teori konstruktivisme.

Untuk memahami fenomena penolakan Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO pada tahun 2023, beberapa literatur digunakan sebagai pedoman analisis. Literatur pertama adalah karya Gürçan dan Karahan (2020) berjudul *Turkey's Foreign Policy and NATO: Between Alliance Solidarity and National Interest*. Penelitian ini membahas dinamika hubungan Turki dengan NATO, termasuk penggunaan hak veto oleh Turki dalam isu-isu strategis. Penulis menekankan bahwa kebijakan luar negeri Turki sering kali dipengaruhi oleh kombinasi kepentingan strategis dan pertimbangan identitas nasional. Dalam konteks NATO, Turki memanfaatkan keanggotaannya untuk menegosiasikan isu-isu yang dianggap vital bagi keamanan domestiknya. Literatur ini relevan karena menjelaskan pola perilaku Turki dalam menggunakan hak veto di NATO, yang menjadi inti dari fenomena penolakan terhadap Swedia.

Literatur kedua adalah karya Bengtsson (2022) berjudul *Sweden and the Kurdish Question: Domestic and International Dimensions*. Tulisan ini mengulas sikap Swedia terhadap isu Kurdi, termasuk pemberian perlindungan politik kepada tokoh-tokoh Kurdi yang dianggap sebagai teroris oleh Turki. Bengtsson menegaskan bahwa kebijakan ini berakar pada komitmen Swedia terhadap nilai-nilai demokrasi dan perlindungan HAM, meskipun berpotensi menimbulkan ketegangan dengan negara-negara yang memiliki pandangan berbeda, termasuk Turki. Literatur ini penting karena memberikan konteks mengapa isu Kurdi menjadi faktor pemicu utama penolakan Turki terhadap Swedia.

Literatur ketiga adalah tulisan Wendt (1992) berjudul *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*, yang memperkenalkan teori konstruktivisme dalam hubungan internasional. Teori ini menyediakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana identitas dan persepsi ancaman membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Konstruktivisme memandang bahwa kepentingan negara tidak hanya didorong oleh faktor material, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang melibatkan norma, nilai, dan identitas.

Meskipun ketiga literatur tersebut memberikan wawasan yang berharga, belum ada yang secara spesifik menjelaskan penolakan Turki terhadap Swedia dari perspektif konstruktivisme dalam konteks keamanan kolektif NATO pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji faktor identitas nasional dan persepsi ancaman yang memengaruhi keputusan Turki. Teori konstruktivisme menekankan bahwa struktur politik internasional tidak hanya dibentuk oleh kekuatan material, tetapi juga oleh ide, identitas, dan norma yang dianut oleh aktor negara.

Identitas negara memengaruhi cara negara tersebut memandang dirinya sendiri dan pihak lain, sehingga membentuk kepentingan nasionalnya.

Dalam hubungan internasional, persepsi ancaman sering kali tidak bersifat objektif, melainkan dibentuk oleh interaksi sosial dan konstruksi identitas. Wendt berargumen bahwa anarki internasional tidak secara otomatis menghasilkan konflik; sebaliknya, interaksi antarnegara dapat membentuk pola kerja sama atau konflik, tergantung pada identitas dan niat masing-masing pihak. Dalam konteks penelitian ini, konstruktivisme digunakan untuk menjelaskan bagaimana identitas nasional Turki — yang sangat menekankan integritas wilayah dan penolakan terhadap separatisme — memengaruhi persepsinya terhadap Swedia, khususnya terkait dukungan Swedia terhadap kelompok Kurdi.

Konsep keamanan kolektif dalam NATO menjadi landasan penting yang tidak dapat diabaikan. Prinsip ini, yang tercantum dalam Pasal 5 Piagam NATO, menyatakan bahwa serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Prinsip ini menuntut solidaritas dan kesediaan setiap anggota untuk mendukung keamanan bersama. Namun, keanggotaan baru memerlukan persetujuan bulat dari seluruh anggota, sehingga setiap negara memiliki hak veto. Hak veto memberi kekuatan signifikan untuk memengaruhi arah kebijakan aliansi. Dalam kasus penolakan terhadap Swedia, Turki memanfaatkan hak ini sebagai bentuk pernyataan bahwa kepentingan nasionalnya harus diakomodasi dalam kerangka keamanan kolektif. Dengan demikian, meskipun NATO berlandaskan prinsip kerja sama, setiap negara anggota tetap mempertahankan hak untuk mengutamakan keamanan nasionalnya sendiri.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder, meliputi:

1. Dokumen resmi pemerintah Turki dan NATO.
2. Artikel ilmiah, buku, dan publikasi akademik.
3. Laporan media internasional terpercaya.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Kerangka teori yang digunakan adalah konstruktivisme, yang memfokuskan analisis pada identitas, norma, dan persepsi ancaman. Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi isu-isu utama dalam hubungan Turki-Swedia, menelaah persepsi Turki terhadap dukungan Swedia kepada kelompok Kurdi, serta memetakan hubungan temuan dengan konsep dalam teori konstruktivisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Turki dan Swedia

Hubungan diplomatik antara Turki dan Swedia telah terjalin sejak lama, namun dalam beberapa dekade terakhir hubungan ini kerap diwarnai dinamika yang kompleks dan fluktuatif. Secara historis, kedua negara menjalin hubungan diplomatik yang relatif stabil, terutama dalam bidang perdagangan, kerja sama multilateral, dan dialog politik di berbagai forum internasional. Namun, perkembangan situasi politik domestik masing-masing negara, serta perbedaan pandangan terhadap isu-isu internasional tertentu, telah menyebabkan hubungan ini mengalami pasang surut yang cukup tajam.

Isu yang paling menonjol dalam hubungan Turki-Swedia adalah perbedaan pandangan terkait masalah Kurdi. Turki menuduh Swedia memberikan perlindungan kepada individu-individu yang memiliki afiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah organisasi yang oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni

Eropa dikategorikan sebagai kelompok teroris. Menurut pemerintah Turki, Swedia tidak hanya memberikan suaka politik kepada tokoh-tokoh Kurdi yang dianggap terlibat dalam aktivitas separatisme dan terorisme, tetapi juga mengizinkan aktivitas politik mereka di wilayah Swedia. Hal ini dianggap sebagai bentuk sikap permisif yang secara langsung bertentangan dengan upaya pemerintah Turki untuk menanggulangi gerakan separatis bersenjata.

Selain masalah Kurdi, perbedaan prinsip mengenai hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi juga menjadi sumber ketegangan bilateral. Swedia memegang teguh prinsip demokrasi liberal yang menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental, termasuk kebebasan untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan negara lain. Di sisi lain, Turki memandang bahwa kebebasan semacam ini memiliki batas, terutama jika mengancam keamanan nasional dan stabilitas negara. Perbedaan prinsip ini kerap menjadi pemicu ketegangan, terutama ketika terjadi aksi-aksi demonstrasi di Swedia yang menargetkan pemerintah Turki atau simbol-simbol agama yang dianggap sakral oleh masyarakat Turki.

Puncak ketegangan terjadi pada awal tahun 2023 ketika di Stockholm, Swedia, seorang aktivis sayap kanan melakukan pembakaran Al-Qur'an di depan Kedutaan Besar Turki. Peristiwa ini memicu gelombang protes besar di Turki dan dikecam keras oleh pemerintah Ankara. Bagi Turki, insiden ini tidak hanya merupakan serangan terhadap simbol agama Islam, tetapi juga bentuk provokasi politik yang memperburuk hubungan kedua negara. Pemerintah Swedia menyatakan bahwa aksi tersebut dilindungi oleh kebebasan berpendapat menurut hukum mereka, namun penjelasan ini tidak mampu meredakan kemarahan publik di Turki.

Secara ekonomi, hubungan Turki–Swedia sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar. Swedia merupakan salah satu mitra dagang penting Turki di kawasan Eropa Utara. Hubungan ekonomi meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi langsung, serta kerja sama di sektor teknologi. Namun, ketegangan politik yang terus berlangsung telah berdampak pada iklim kerja sama ekonomi. Kepercayaan politik yang menurun membuat beberapa proyek kerja sama bilateral tertunda atau dibatalkan.

Dalam konteks keanggotaan NATO, hubungan bilateral yang tegang ini menjadi penghalang besar bagi Swedia. Turki, sebagai anggota NATO sejak 1952, memanfaatkan posisinya untuk memblokir keanggotaan Swedia, dengan alasan bahwa Swedia tidak menunjukkan itikad baik untuk menghormati kepentingan keamanan nasional Turki. Penolakan ini menjadi simbol bahwa dalam politik internasional, hubungan bilateral yang buruk dapat secara langsung memengaruhi kebijakan di tingkat organisasi internasional.

Dengan demikian, hubungan Turki–Swedia saat ini berada pada titik kritis di mana kedua negara perlu mengambil langkah-langkah diplomatis yang lebih serius untuk memperbaiki hubungan jika ingin membuka jalan bagi keanggotaan Swedia di NATO. Tanpa adanya rekonsiliasi yang nyata, terutama terkait isu Kurdi dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang dianggap vital oleh Turki, hubungan bilateral ini akan tetap berada dalam ketegangan yang tinggi, bahkan berpotensi semakin memburuk.

Penolakan Turki terhadap Swedia Masuk ke NATO

Penolakan Turki terhadap permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO pada tahun 2023 menjadi salah satu peristiwa diplomatik yang paling menonjol dalam dinamika aliansi tersebut selama dekade terakhir. Sebagai organisasi pertahanan kolektif, NATO

mengharuskan persetujuan bulat dari semua negara anggota untuk menerima anggota baru. Hal ini berarti bahwa satu negara saja dapat memblokir proses keanggotaan, dan dalam kasus ini, Turki memanfaatkan hak vetonya untuk menghentikan langkah Swedia menjadi anggota penuh NATO.

Dari sudut pandang Turki, penolakan ini bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan hasil akumulasi ketegangan politik dan perbedaan pandangan strategis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Salah satu alasan utama adalah tuduhan Turki bahwa Swedia memberikan perlindungan dan dukungan politik kepada kelompok Kurdi, khususnya Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Unit Perlindungan Rakyat (YPG), yang oleh Turki dianggap sebagai organisasi teroris. Ankara menilai bahwa keberadaan jaringan dan aktivitas kelompok Kurdi di Swedia tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga membahayakan keamanan domestik Turki.

Selain isu Kurdi, Turki juga menyoroti kebijakan Swedia yang cenderung permisif terhadap individu yang terlibat dalam kudeta militer yang gagal di Turki pada tahun 2016. Beberapa orang yang dicurigai oleh pemerintah Turki sebagai anggota Gerakan Gülen—yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta tersebut—diketahui mendapat suaka di Swedia. Bagi Ankara, kebijakan ini menjadi bukti bahwa Swedia tidak sepenuhnya bersedia bekerja sama dalam isu-isu yang sangat sensitif bagi keamanan nasional Turki.

Penolakan Turki juga tidak dapat dipisahkan dari konteks politik domestiknya. Presiden Recep Tayyip Erdoğan memanfaatkan isu ini untuk memperkuat citra politiknya di dalam negeri sebagai pemimpin yang tegas dan tidak ragu mempertahankan kedaulatan negara. Dalam situasi politik yang penuh tekanan, termasuk tantangan ekonomi dan kritik oposisi, sikap keras terhadap Swedia menjadi alat yang

efektif untuk menggalang dukungan dari basis politik nasionalis. Dengan menegaskan penolakannya di forum internasional, Erdoğan mengirim pesan bahwa kepentingan dan keamanan nasional Turki adalah prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan.

Selain faktor internal, dinamika politik di dalam NATO juga menjadi pertimbangan penting. Turki ingin menegaskan posisinya sebagai anggota penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan aliansi. Dengan menggunakan hak veto, Turki menunjukkan bahwa meskipun NATO adalah aliansi kolektif, setiap negara anggota memiliki otonomi untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Penolakan terhadap Swedia sekaligus menjadi pesan kepada negara anggota lain bahwa keputusan strategis tidak bisa diambil tanpa mempertimbangkan semua pihak.

Penting juga dicatat bahwa penolakan Turki tidak sepenuhnya bersifat permanen. Pemerintah Turki pada prinsipnya membuka kemungkinan untuk mencabut hak vetonya jika Swedia bersedia memenuhi sejumlah syarat yang diajukan. Di antaranya adalah memperketat undang-undang antiterorisme, menghentikan dukungan terhadap kelompok Kurdi yang dianggap teroris, dan memperkuat kerja sama keamanan dengan Ankara. Namun, hingga saat ini, pembicaraan antara kedua negara belum menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi Turki.

Dengan demikian, penolakan Turki terhadap Swedia masuk ke NATO tidak hanya merupakan reaksi terhadap kebijakan luar negeri Swedia, tetapi juga merupakan strategi politik yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik, regional, dan internasional. Keputusan ini memperlihatkan bahwa dalam kerangka kerja sama internasional seperti NATO, kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi setiap negara anggota,

bahkan ketika dihadapkan pada isu yang menyangkut keamanan kolektif.

Konflik Turki dan PKK

Konflik antara Turki dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) merupakan salah satu konflik bersenjata internal yang paling panjang dan kompleks di kawasan Timur Tengah. PKK didirikan pada tahun 1978 oleh Abdullah Öcalan sebagai gerakan separatis yang bertujuan mendirikan negara merdeka bagi etnis Kurdi di wilayah tenggara Turki. Pada awalnya, PKK mengusung ideologi Marxis-Leninis dan melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Turki sejak 1984.

Pemerintah Turki menganggap PKK sebagai organisasi teroris karena aksi-aksinya yang mencakup serangan bersenjata, pengeboman, dan penculikan. Konflik ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa, baik dari pihak militer maupun sipil, serta menyebabkan jutaan orang mengungsi dari daerah konflik. Dampak sosial-ekonomi dari konflik ini sangat signifikan, termasuk keterlambatan pembangunan di wilayah tenggara Turki yang mayoritas berpenduduk Kurdi.

Bagi Turki, PKK bukan sekadar ancaman keamanan, tetapi juga tantangan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, strategi pemerintah terhadap PKK mencakup operasi militer skala besar di wilayah tenggara, operasi lintas batas ke wilayah Irak utara tempat basis PKK berada, serta kebijakan politik yang bertujuan melemahkan dukungan publik terhadap kelompok ini.

PKK sendiri, meskipun mengalami penurunan kekuatan pada akhir 1990-an setelah penangkapan Abdullah Öcalan pada 1999, tetap mampu bertahan dan menyesuaikan strategi perjuangannya. Kelompok ini mengubah sebagian pendekatannya menjadi perjuangan politik melalui partai-partai pro-Kurdi di Turki,

meskipun hubungan antara partai-partai ini dan PKK tetap menjadi kontroversi yang memicu ketegangan politik domestik.

Isu PKK juga memiliki dimensi internasional yang kompleks. Beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa, mengakui PKK sebagai organisasi teroris. Namun, pada saat yang sama, kelompok Kurdi di Suriah yang berafiliasi dengan PKK, seperti Unit Perlindungan Rakyat (YPG), menjadi sekutu penting Amerika Serikat dalam memerangi ISIS. Bagi Turki, hal ini menciptakan dilema keamanan yang serius karena YPG dianggap sebagai perpanjangan tangan PKK.

Dalam konteks hubungan dengan Swedia, isu PKK menjadi salah satu hambatan terbesar bagi keanggotaan Swedia di NATO. Turki menuduh Swedia memberikan perlindungan politik kepada individu yang memiliki hubungan dengan PKK dan tidak mengambil tindakan tegas untuk mengekstradisi mereka ke Turki. Ankara menilai bahwa sikap Swedia ini bertentangan dengan prinsip kerja sama keamanan dan memicu ketidakpercayaan yang mendalam.

Konflik Turki-PKK tidak hanya menjadi isu domestik tetapi juga memengaruhi kebijakan luar negeri Turki secara luas, termasuk posisinya di NATO. Dengan menolak keanggotaan Swedia, Turki mengirimkan pesan bahwa setiap negara yang ingin bekerja sama secara strategis dengan Ankara harus menghormati kepentingan dan sensitivitasnya terkait isu PKK.

Sejarah PKK

Partai Pekerja Kurdistan atau Partiya Karkerên Kurdistan (PKK) merupakan organisasi politik dan militer yang lahir pada akhir dekade 1970-an sebagai representasi perjuangan sebagian etnis Kurdi di Turki. PKK didirikan pada 27 November 1978 di desa Fis, dekat Lice, Provinsi

Diyarbakır, Turki tenggara, oleh Abdullah Öcalan dan sekelompok aktivis mahasiswa Kurdi. Ideologi awal PKK berakar pada paham Marxis-Leninis yang dikombinasikan dengan nasionalisme Kurdi yang kuat.

Pada awal pembentukannya, PKK berfokus pada mobilisasi massa dan propaganda untuk membangkitkan kesadaran nasionalisme Kurdi. Tujuan awal organisasi ini adalah mendirikan negara merdeka Kurdistan yang mencakup wilayah tenggara Turki, sebagian Suriah, Irak utara, dan Iran barat. Wilayah-wilayah ini dipilih karena merupakan daerah dengan populasi Kurdi yang signifikan.

PKK mulai melakukan aksi bersenjata pada tahun 1984, menandai dimulainya konflik bersenjata dengan pemerintah Turki. Serangan-serangan awal menargetkan pos militer Turki dan tokoh-tokoh yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah. Aksi ini segera memicu respon keras dari pemerintah Turki, yang melancarkan operasi militer besar-besaran di wilayah tenggara negara itu.

Sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, PKK mengembangkan strategi perang gerilya di wilayah pegunungan Turki tenggara dan membangun basis di Irak utara. Wilayah pegunungan Qandil menjadi markas penting bagi PKK, karena letaknya yang strategis dan sulit dijangkau oleh militer Turki. Dukungan logistik dan politik juga datang dari diaspora Kurdi di Eropa, yang membantu PKK dalam penggalangan dana dan kampanye internasional.

Konflik antara PKK dan pemerintah Turki memuncak pada 1990-an, dengan ribuan korban jiwa di kedua belah pihak. Pada periode ini, PKK juga dituduh melakukan serangan yang menargetkan warga sipil, yang semakin memperkuat pandangan Turki dan banyak negara lain bahwa PKK adalah organisasi teroris.

Titik balik penting terjadi pada 1999 ketika Abdullah Öcalan ditangkap di Nairobi, Kenya, dalam operasi gabungan intelijen Turki dan internasional. Penangkapan ini menjadi pukulan besar bagi PKK, namun organisasi tersebut tetap bertahan. Pasca penangkapan Öcalan, PKK mengumumkan gencatan senjata sepihak dan mulai mengubah orientasinya dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik melalui partai-partai legal yang beroperasi di Turki.

Meskipun demikian, gencatan senjata tersebut tidak sepenuhnya menghentikan bentrokan antara PKK dan aparat keamanan Turki. Pada 2000-an, pertempuran sporadis terus terjadi, terutama setelah runtuhnya perundingan damai pada 2015. PKK juga mengadaptasi strategi baru dengan memanfaatkan kelompok afiliasinya di Suriah, seperti YPG, untuk memperluas pengaruhnya di kawasan.

Saat ini, PKK masih dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional Turki. Pemerintah Turki menempatkan PKK dalam daftar organisasi teroris, sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sejarah panjang PKK yang penuh dengan kekerasan bersenjata, ideologi radikal, dan perjuangan separatis menjadi latar belakang mengapa isu ini menjadi sangat sensitif bagi Ankara. Bagi Turki, keberadaan PKK bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga masalah kedaulatan dan identitas nasional yang tidak dapat dinegosiasikan.

HASIL TEMUAN DAN ANALISA

Penelitian ini menemukan bahwa penolakan Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh isu keamanan nasional, khususnya terkait keberadaan dan aktivitas kelompok Kurdi yang oleh Ankara dianggap sebagai ancaman. Faktor ini diperkuat oleh identitas nasional Turki yang

menekankan integritas wilayah dan penolakan terhadap separatisme.

Selain itu, dinamika politik domestik di Turki turut mendorong sikap keras pemerintah terhadap Swedia, sementara hak veto dalam NATO memberi Turki posisi tawar yang kuat untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Analisis dengan teori konstruktivisme menunjukkan bahwa keputusan ini merupakan hasil interaksi antara identitas nasional, persepsi ancaman, dan strategi mempertahankan posisi dalam sistem internasional.

Analisa Pemenuhan Keamanan Geo-Ekonomi Tiongkok di Afghanistan

Dalam perspektif konstruktivisme, identitas negara menjadi salah satu faktor utama yang membentuk kepentingan nasional dan perilaku politik luar negeri. Identitas dibangun melalui sejarah, nilai, norma, dan pengalaman kolektif yang kemudian memengaruhi cara negara tersebut memandang dirinya sendiri maupun pihak lain di arena internasional.

Bagi Turki, identitas nasionalnya dibentuk oleh sejarah panjang sebagai negara penerus Kekaisaran Ottoman, pengalaman mempertahankan kedaulatan, dan ancaman separatisme yang terus berlanjut, khususnya dari kelompok Kurdi. Identitas ini menekankan pentingnya integritas wilayah, stabilitas internal, dan penolakan terhadap segala bentuk dukungan pada gerakan separatis. Dalam kerangka NATO, Turki memandang bahwa solidaritas keamanan kolektif harus selaras dengan perlindungan terhadap kepentingan nasionalnya, terutama dalam isu keamanan domestik.

Sementara itu, identitas Swedia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal, netralitas militer yang berlangsung selama berabad-abad, dan komitmen kuat terhadap perlindungan hak

asasi manusia serta kebebasan berekspresi. Pandangan ini mendorong Swedia untuk memberikan perlindungan kepada kelompok dan individu yang mengalami penindasan politik, termasuk kelompok Kurdi yang dianggap terpinggirkan di beberapa negara. Kebijakan ini sejalan dengan identitas Swedia sebagai negara pelindung HAM, namun di mata Turki justru dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan nasionalnya.

Perbedaan identitas inilah yang menjadi sumber utama ketegangan antara kedua negara. Dari perspektif konstruktivisme, konflik Turki–Swedia bukan hanya persoalan kepentingan strategis, tetapi juga benturan nilai dan persepsi yang tertanam dalam identitas masing-masing negara. Selama identitas ini tidak mengalami penyesuaian atau kompromi, sulit bagi kedua pihak untuk mencapai titik temu yang dapat membuka jalan bagi keanggotaan penuh Swedia di NATO.

Identitas Etnis Kurdi di Ranah Internasional

Etnis Kurdi merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di dunia yang tidak memiliki negara berdaulat. Populasi Kurdi diperkirakan mencapai 30–40 juta jiwa, tersebar di Turki, Irak, Iran, dan Suriah, serta komunitas diaspora di Eropa dan Amerika Utara. Identitas Kurdi terbentuk dari sejarah panjang perjuangan untuk pengakuan politik, hak budaya, dan otonomi wilayah. Di ranah internasional, identitas ini kerap diartikulasikan melalui narasi perjuangan kemerdekaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perspektif konstruktivisme, identitas Kurdi tidak hanya ditentukan oleh faktor etnis dan budaya, tetapi juga oleh interaksi politik dengan negara-negara tempat mereka tinggal, organisasi internasional, serta opini publik global. Perjuangan Kurdi di berbagai wilayah memiliki dimensi yang berbeda, namun terhubung oleh kesamaan aspirasi untuk

mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari komunitas internasional.

Di Turki, identitas Kurdi sering kali diposisikan dalam kerangka separatisme karena keterlibatan sebagian kelompok Kurdi, seperti Partai Pekerja Kurdistan (PKK), dalam gerakan bersenjata melawan pemerintah. Hal ini membentuk persepsi Turki bahwa ekspresi politik Kurdi selalu terkait dengan ancaman terhadap integritas negara. Sebaliknya, di sebagian masyarakat internasional, terutama di negara-negara Barat, identitas Kurdi kerap diasosiasikan dengan kelompok yang terpinggirkan dan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, sehingga layak mendapatkan dukungan dan perlindungan.

Perbedaan persepsi ini menciptakan ketegangan dalam diplomasi internasional. Di satu sisi, negara-negara seperti Swedia memandang perlindungan terhadap aktivis Kurdi sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai HAM. Di sisi lain, Turki melihat langkah tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap keamanan nasionalnya. Dalam kerangka NATO, perbedaan pandangan ini menjadi salah satu hambatan utama bagi konsensus mengenai keanggotaan Swedia.

Dengan demikian, identitas etnis Kurdi di ranah internasional adalah identitas yang kompleks, multi-dimensi, dan sarat dengan kepentingan politik. Perbedaan cara pandang terhadap identitas ini menjadi salah satu faktor kunci yang menjelaskan mengapa isu Kurdi memiliki dampak signifikan terhadap hubungan bilateral Turki–Swedia dan dinamika di NATO.

Ancaman Menurut Pandangan Konstruktivisme

Dalam pandangan konstruktivisme, ancaman bukanlah sesuatu yang sepenuhnya objektif atau tetap, melainkan dibentuk oleh interaksi sosial, sejarah, dan identitas yang dianut oleh

suatu negara. Alexander Wendt (1992) menegaskan bahwa “anarki adalah apa yang dibuat negara darinya,” yang berarti bahwa persepsi terhadap ancaman sangat bergantung pada bagaimana suatu negara memandang aktor lain berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai yang dimilikinya. Dengan kata lain, suatu tindakan atau aktor yang dianggap sebagai ancaman oleh satu negara, belum tentu dipersepsikan sama oleh negara lain.

Ancaman, dalam konstruktivisme, merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang melibatkan penafsiran terhadap niat dan identitas pihak lain. Apabila identitas pihak lain dianggap bertentangan dengan identitas dan kepentingan nasional suatu negara, maka interaksi yang terjadi cenderung memunculkan persepsi ancaman. Sebaliknya, jika identitas tersebut dilihat sebagai sejalan atau kompatibel, potensi ancaman dapat diminimalkan meskipun kekuatan materialnya besar.

Dalam konteks hubungan Turki–Swedia, konstruktivisme membantu menjelaskan mengapa dukungan Swedia terhadap kelompok Kurdi dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial oleh Turki. Bagi Turki, identitas nasionalnya dibangun atas dasar integritas wilayah dan penolakan terhadap separatisme. Oleh karena itu, setiap bentuk dukungan terhadap PKK atau afiliasinya, seperti YPG, secara otomatis dikonstruksikan sebagai ancaman yang mengganggu stabilitas domestik. Sebaliknya, bagi Swedia, dukungan kepada kelompok Kurdi dipandang sebagai konsistensi terhadap identitas nasionalnya yang berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Perbedaan cara pandang inilah yang menciptakan benturan persepsi ancaman di antara kedua negara.

Dengan demikian, dalam kerangka konstruktivisme, ancaman tidak hanya berkaitan dengan kemampuan militer atau

kekuatan material pihak lain, tetapi lebih kepada bagaimana suatu negara menginterpretasikan niat dan identitas pihak tersebut. Persepsi ancaman yang dibentuk melalui interaksi sosial dan konstruksi identitas inilah yang kemudian mempengaruhi keputusan politik luar negeri, seperti dalam kasus Turki yang menggunakan hak vetonya untuk menolak keanggotaan Swedia di NATO.

Perspektif Ancaman oleh Etnis Kurdi terhadap Turki Menurut Teori Konstruktivisme

Dalam kerangka teori konstruktivisme, ancaman tidak semata-mata bersumber dari kekuatan material atau kemampuan militer pihak lain, melainkan terbentuk melalui konstruksi sosial yang dibangun dari interaksi sejarah, identitas, dan persepsi kolektif suatu negara. Ancaman muncul ketika identitas dan nilai-nilai yang dipegang suatu aktor dipandang bertentangan dengan identitas dan kepentingan nasional negara lain.

Bagi Turki, etnis Kurdi—terutama yang terafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK)—dipandang sebagai ancaman utama terhadap stabilitas dan integritas negara. Sejak PKK memulai perlawanan bersenjata pada 1984, konflik yang terjadi telah memakan puluhan ribu korban jiwa dan mengakibatkan ketidakstabilan di wilayah tenggara Turki. Identitas nasional Turki yang menempatkan kesatuan teritorial sebagai prinsip utama membentuk persepsi bahwa setiap gerakan politik Kurdi yang bersifat separatis adalah ancaman eksistensial.

Dalam perspektif konstruktivisme, persepsi ancaman ini tidak hanya berasal dari fakta adanya aktivitas militer PKK, tetapi juga dari konstruksi historis yang memandang gerakan Kurdi sebagai upaya pemisahan diri dari negara. Hal ini diperkuat oleh memori kolektif dan narasi politik yang diwariskan dari generasi ke generasi di Turki, yang menempatkan isu

separatisme sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kelangsungan negara.

Persepsi ancaman ini semakin menguat ketika kelompok Kurdi mendapatkan dukungan politik dan moral dari negara-negara lain, termasuk Swedia. Di mata Turki, pemberian suaka politik, perlindungan hukum, dan kebebasan bagi kelompok atau individu yang dianggap terlibat dalam PKK atau jaringan afiliasinya bukan hanya bentuk intervensi tidak langsung terhadap urusan dalam negeri, tetapi juga validasi terhadap gerakan yang mereka anggap sebagai terorisme.

Konstruktivisme menjelaskan bahwa perbedaan interpretasi terhadap identitas dan tujuan kelompok Kurdi inilah yang menciptakan benturan persepsi antara Turki dan pihak-pihak yang mendukung Kurdi. Bagi sebagian negara Barat, termasuk Swedia, etnis Kurdi dipandang sebagai kelompok minoritas yang memerlukan perlindungan hak asasi manusia. Namun, bagi Turki, pandangan tersebut justru melemahkan upaya menjaga kesatuan negara dan memperkuat ancaman yang datang dari kelompok separatis.

Dengan demikian, perspektif ancaman oleh etnis Kurdi terhadap Turki tidak dapat dipahami hanya melalui analisis kekuatan militer atau potensi aksi bersenjata, tetapi juga harus dilihat sebagai hasil konstruksi identitas dan pengalaman historis yang membentuk kebijakan luar negeri Turki. Pandangan ini menjelaskan mengapa isu Kurdi menjadi faktor sentral dalam penolakan Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO pada tahun 2023.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penolakan Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO pada tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari kombinasi faktor historis, identitas nasional, dan persepsi ancaman yang

telah terbentuk selama puluhan tahun. Isu kelompok Kurdi, khususnya PKK dan afiliasinya, menjadi inti dari perbedaan pandangan antara kedua negara. Bagi Turki, dukungan Swedia terhadap kelompok ini dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap integritas dan stabilitas nasional, sedangkan bagi Swedia, kebijakan tersebut merupakan manifestasi dari komitmen terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

Pendekatan konstruktivisme membantu menjelaskan bagaimana identitas dan persepsi ancaman membentuk kebijakan luar negeri Turki. Dalam kerangka ini, ancaman tidak hanya dilihat sebagai hasil kalkulasi kekuatan material, tetapi juga sebagai produk konstruksi sosial dan politik yang lahir dari interaksi historis dan nilai-nilai yang dianut. Perbedaan identitas dan interpretasi terhadap ancaman inilah yang membuat konsensus sulit dicapai, bahkan dalam kerangka kerja sama keamanan kolektif seperti NATO.

Dengan demikian, memahami dinamika hubungan Turki-Swedia memerlukan analisis yang melampaui pendekatan realis atau materialis semata. Faktor identitas, persepsi ancaman, dan kepentingan nasional yang dikonstruksi secara sosial menjadi kunci untuk menjelaskan sikap keras Turki, sekaligus tantangan utama dalam mencari jalan keluar dari kebuntuan diplomatik yang ada.

Daftar Pustaka

- Affairs, R. o. (2022). Türkiye–Sweden Relations. Retrieved from Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs: <https://www.mfa.gov.tr/turkiye-isvec-siyasi-iliskileri.tr.mfa>
- Aljazeera. (2023, January 30). Timeline of political relations between Sweden and Turkey. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/22/timelin-e-political-tensions-between-sweden-and-turkey>

- Anadolu Agency. (2023, January 26). Turkey urges Sweden to take concrete steps on PKK, FETO. Retrieved from <https://www.aa.com.tr/en>
- BBC. (2019, Oktober 16). Diperangi Erdogan, tak diakui di Suriah, siapa sesungguhnya bangsa Kurdi? Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50068256>
- BBC News. (2023, January 24). Turkey blocks Sweden's NATO bid over Quran-burning protest. Retrieved from <https://www.bbc.com>
- Center, N. C. (2022, October). Kurdistan Workers' Party (PKK). Retrieved from Counter Terrorism Guide: https://www.dni.gov/nctc/ftos/pkk_fto.html
- Council on Foreign Relations. (2023). The NATO Alliance. Retrieved from <https://www.cfr.org>
- Gürcan, M., & Karahan, A. (2020). Turkey's Foreign Policy and NATO: Between Alliance Solidarity and National Interest. Ankara: SETA Foundation.
- Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory. *International Security*, 23(1), 171–200.
- Norell, M. (2022, Juni 27). Keanggotaan NATO untuk Swedia: Antara Turki dan Kurdi. Retrieved from Washington Institute: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/nato-membership-sweden-between-turkey-and-kurds>
- North Atlantic Treaty Organization. (2023). Official NATO Website. Retrieved from <https://www.nato.int>
- Reuters. (2023, January 25). Why is Turkey blocking Swedish, Finnish NATO membership?. Retrieved from <https://www.reuters.com/world/why-is-turkey-blocking-swedish-finnish-nato-membership-2023-01-25/>
- Theys, S. (2018). Introducing Constructivism in International Relations Theory.
- TRT World. (2023, January 28). Why Ankara is holding up Sweden's NATO membership. Retrieved from <https://www.trtworld.com>
- Waltz, K. N. (2001). *Man, the State and War: A Theoretical Analysis*. New York: Columbia University Press.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.
- Yilmaz, S. (2021). Turkey's Counter-Terrorism Policy Against PKK. *Journal of Strategic Studies*, 14(2), 55–74.